

**PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN *ECOTOURISM* BERBASIS
MANGROVE LIBSANGAJ DI DESA POHEA KECAMATAN SANANA UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Abdul Haris Soamangon¹, Andiah Nurhaeny², Rifyan Ruman³
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura Ambon
e-mail: Abdlharis156@gmail.com

ABSTRAK

Wisata Mangrove Libsangaj dikelola oleh BUMDes Manayana terdapat temuan bahwa kurangnya sosialisasi dan fungsi kontrol dari kelembagaan pada program pengembangan ekowisata berbasis mangrove di Desa Pohea dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan rendahnya kualitas sumber dayamasyarakat lokal (keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata) selain itu kurangnya peran kelembagaan sebagai fasilitator dalam kerja sama antar perhatian dari kelembagaan sehingga terdapat kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan para stakeholders. Jumlah Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang terdiri dari 20 orang dari unsur Masyarakat berbatasan langsung dengan ekosistem mangrove, 10 orang dari wisatawan dan 5 orang dari unsur pemerintah baik dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis SWOT, digunakan untuk mendeskripsikan rencana pengembangan serta peran kelembagaan dalam pengembangan ekowisata mangrove. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Mangrove Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara diklasifikasikan menjadi 6 elemen yang tergabung antara lain Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Pariwisata, Pemerintah Desa Pohea dan Masyarakat Desa². (Diversifikasi Strategi) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan berdasarkan hasil perhitungan SWOT agar mendukung pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara.

Kata kunci: *Ecotourism, Mangrove, Peran Kelembagaan, Pengembangan Berkelanjutan*

ABSTRACT

Libsangaj Mangrove Tourism is managed by BUMDes Manayana, there are findings that the lack of socialization and control function of institutions in the mangrove-based ecotourism development program in Pohea Village and the benefits are less felt by the surrounding community and the low quality of local human resources (limited reliable human resources in environmental management and tourism development) in addition to the lack of institutional roles as facilitators in cooperation between institutional concerns so that there is a lack of maintenance of existing infrastructure, as well as a lack of attention or cooperation with stakeholders. The number of respondents in this study was 35 respondents consisting of 20 people from the community elements directly adjacent to the mangrove ecosystem, 10 people from tourists and 5 people from government elements both from the Tourism Office and the Village Government. Qualitative Descriptive Analysis and SWOT Analysis, are used to describe the development plan and the role of institutions in the development of mangrove ecotourism. Stakeholders involved in the development of Mangrove ecotourism in Pohea Village, North Sanana District are classified into 6 elements which are included, including Bappeda of Sula Islands Regency, Environmental Service, Forestry Service, Tourism, Pohea Village Government and Village Community². (Diversification Strategy) is one of the

strategies that can be used based on the results of SWOT calculations to support the development of mangrove ecotourism in Pohea Village, North Sanana District.

Keywords: *Ecotourism, Mangrove, Institutional Role, Sustainable*

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis ekologi atau *ecotourism* merupakan salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berupaya menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Model pariwisata ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pelestarian sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pengelolaannya (Suting et al., 2020). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekowisata, terutama di wilayah pesisir yang kaya dengan ekosistem mangrove. Keberadaan hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai, tempat hidup berbagai biota laut, serta sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat pesisir (Gunawan et al., 2018). Namun demikian, tekanan pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya pengawasan lingkungan menyebabkan banyak kawasan mangrove mengalami degradasi.

Salah satu daerah dengan potensi besar namun menghadapi tantangan pengelolaan adalah Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Kawasan Hutan Mangrove Libsangaj di desa ini memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi serta telah dikembangkan menjadi destinasi wisata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manayana. Program pengembangan wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa melalui konsep *community-based tourism*. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai hambatan seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, minimnya pelatihan masyarakat, dan terbatasnya promosi wisata (Andiny, 2020; Tamrin & Rifti, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat sistem kelembagaan agar pengelolaan wisata dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kelembagaan menjadi elemen penting dalam keberhasilan pengelolaan ekowisata karena berperan dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar pihak, dan pengaturan distribusi manfaat ekonomi (Ayesha et al., 2020). Dalam konteks pariwisata berbasis mangrove, kelembagaan tidak hanya mencakup pemerintah desa, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pariwisata yang memiliki kewenangan dan kepentingan berbeda. Namun, koordinasi antar pihak tersebut sering kali belum berjalan secara sinergis, sehingga pengelolaan kawasan wisata kurang maksimal. Permasalahan serupa juga ditemukan pada berbagai studi pengelolaan kawasan pesisir di daerah lain, di mana lemahnya integrasi kelembagaan menjadi faktor utama penghambat pengembangan ekowisata (Mandar & Alfira, 2014).

Selain aspek kelembagaan, pengelolaan ekowisata juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dibangun melalui mekanisme yang transparan dan saling menguntungkan (Rahayu & Amrin, 2022). Dalam kerangka tersebut, Desa Pohea dapat dijadikan contoh penting bagaimana sinergi antar pihak mampu menentukan keberlanjutan suatu program wisata berbasis lingkungan. Ketika hubungan kelembagaan bersifat partisipatif dan didukung koordinasi yang kuat, maka potensi ekowisata dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem mangrove.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan (Anantanyu, 2011; Guntur, 2017; Warningsih et al., 2020). Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekologis dan ekonomi, sementara dimensi kolaborasi kelembagaan lokal dan strategi penguatan peran antar-

stakeholder belum banyak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengkaji bagaimana peran dan tingkat pengaruh kelembagaan terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata Mangrove Libsangaj di Desa Pohea, serta bagaimana strategi penguatan yang dapat diterapkan untuk mencapai pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk, menganalisis peran dan tingkat pengaruh masing-masing kelembagaan dalam pengembangan ekowisata Mangrove Libsangaj di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan ekowisata melalui pendekatan analisis SWOT. Merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan ekowisata mangrove, serta dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi dan potensi ekowisata mangrove di Desa Pohea secara mendalam. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi terhadap sarana dan prasarana wisata serta wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen instansi pemerintah, literatur ilmiah, dan informasi daring yang relevan dengan topik penelitian. Responden penelitian berjumlah 35 orang, terdiri atas 20 warga yang tinggal di sekitar kawasan mangrove, 10 wisatawan, dan 5 perwakilan dari pihak pemerintah daerah serta Dinas Pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber pendukung. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Informasi yang diperoleh dari narasumber digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak (*stakeholder*) yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove. Selanjutnya, dilakukan analisis SWOT guna menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pengembangan kawasan tersebut sehingga dapat dirumuskan strategi pengelolaan yang lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Lokasi Wisata Mangrove Desa Pohea

Kawasan wisata Mangrove Libsangaj berlokasi di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Wilayah ini mulai dikembangkan sejak tahun 2018–2019 melalui pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan untuk menciptakan destinasi wisata berbasis ekosistem mangrove. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mayana, yang bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai wisata terpadu yang menggabungkan unsur rekreasi, edukasi, konservasi, dan kuliner. Saat ini kawasan tersebut telah memiliki jembatan titian, lima unit homestay, delapan gazebo, satu kantin dan rumah makan, satu toilet umum, sejumlah spot foto, area parkir, dan akses internet gratis. Walaupun sebagian besar fasilitas masih dapat difungsikan, beberapa di antaranya telah mengalami kerusakan akibat minimnya perawatan dan koordinasi pengelolaan (Andiny, 2020; Suting et al., 2020).



Gambar 1. Peta Kondisi Eksisting

Gambar 1 menampilkan peta kondisi eksisting kawasan ekowisata Mangrove Libsangaj. Sebagian besar infrastruktur terkonsentrasi di sisi timur desa yang berdekatan dengan permukiman warga dan jalur transportasi utama. Namun, akses menuju area konservasi masih terbatas karena belum adanya jalur pejalan kaki yang representatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang wisata perlu mempertimbangkan aspek konektivitas dan aksesibilitas yang seimbang antara kawasan wisata dan lingkungan masyarakat sekitar (Saputra et al., 2016; Jaelani et al., 2024). Peta kondisi eksisting berfungsi penting sebagai alat analisis spasial dalam penentuan zonasi aktivitas wisata dan area prioritas rehabilitasi mangrove agar pengelolaan wisata tetap berkelanjutan (Puspita et al., 2022; Gunawan et al., 2018).

Peran Lembaga Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Pohea

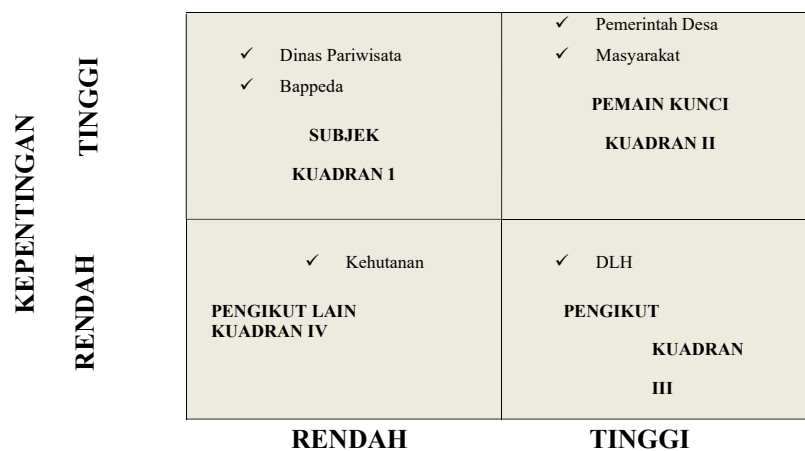
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelolaan ekowisata Mangrove Libsangaj dilakukan oleh BUMDes Mayana dengan dukungan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Namun, koordinasi antarlembaga masih belum optimal. Kurangnya komunikasi dan pembagian peran antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menyebabkan sebagian fasilitas tidak terpelihara dengan baik (Tamrin & Rifti, 2023). Dalam konteks ini, efektivitas kelembagaan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan ekowisata sebagaimana disampaikan oleh Anantanyu (2011) dan Warningsih et al. (2020), bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kapasitas lembaga lokal.

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di Desa Pohea terdiri dari enam unsur utama, yaitu Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Pohea, dan masyarakat lokal. Berdasarkan wawancara mendalam, Pemerintah Desa dan masyarakat memiliki nilai pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) tertinggi dalam pengelolaan wisata, sedangkan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki pengaruh terendah karena keterlibatan mereka cenderung administratif (Rahayu & Amrin, 2022; Guntur, 2017).

Tabel 1. Perhitungan Bobot Pengaruh dan Kepentingan

Kuesioner	Stakeholder					
	Pariwisata	Bappeda	Kehutanan	DLH	PEMDES	Masyarakat
Jumlah Kuisisioner	12	15	10	10	20	19
Bobot	1,71	2,14	1,43	1,43	2,86	2,71

Tabel 1 menggambarkan hasil analisis perbandingan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) antar-stakeholder dalam pengelolaan wisata mangrove Desa Pohea. Setiap lembaga dinilai berdasarkan peran, kapasitas sumber daya, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan ekowisata. Dari tabel ini terlihat bahwa Pemerintah Desa Pohea dan masyarakat lokal memiliki bobot tertinggi, yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan aktor paling berpengaruh dan berkepentingan langsung terhadap keberlanjutan wisata mangrove. Sebaliknya, instansi teknis seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup memperoleh bobot rendah karena keterlibatan mereka bersifat temporer dan lebih fokus pada fungsi administratif. Hasil ini memberikan dasar empiris untuk memetakan kekuatan kolaborasi antar lembaga dan menentukan strategi penguatan peran bagi aktor yang masih memiliki pengaruh rendah namun berpotensi strategis. Dengan demikian, tabel ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah sinergi kelembagaan yang lebih efektif dan inklusif.



Gambar 2. Pemetaan Stakholder dalam Pengembangan Pariwisata

Gambar 2 menampilkan hasil pemetaan posisi stakeholder berdasarkan kombinasi nilai pengaruh dan kepentingan yang telah diperoleh dari tabel sebelumnya. Dalam matriks empat kuadran ini, Pemerintah Desa Pohea dan masyarakat menempati Kuadran II (pemain kunci), menandakan bahwa keduanya memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang sama-sama tinggi dalam keberhasilan program ekowisata. Sementara itu, Bappeda dan Dinas Pariwisata berada pada Kuadran I (subjek utama) dengan pengaruh besar namun kepentingan menengah, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut berperan sebagai pendukung kebijakan dan fasilitator teknis. Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan berada di kuadran bawah (III dan IV), yang berarti mereka memerlukan peningkatan koordinasi agar dapat berkontribusi lebih optimal. Visualisasi ini memperjelas hubungan hierarkis antar lembaga serta menunjukkan area di mana kolaborasi dapat diperkuat. Dengan memahami posisi setiap pihak dalam matriks, strategi komunikasi, koordinasi, dan pembagian tanggung jawab dapat disusun

dengan lebih terarah untuk mendukung pengelolaan wisata mangrove yang berkelanjutan.

Tabel 2. Perhitungan Matriks IFAS

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1.	Posisi strategis dengan pusat kota maupun perkantoran	0,15	4,33	0,66
2.	Memiliki tempat penangkaran ikan yang berada tepat di lokasi wisata	0,13	4,46	0,57
3.	Memiliki keunikan kuliner lokal	0,14	3,99	0,54
4.	memiliki Keindahan bawah laut	0,14	4,15	0,60
Sub Total		0,56		2,37
No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Bobot	Rating	Skor
1.	Kurangnya fasilitas umum yang mampu mendukung aktifitas wisatawan	0,11	3,64	0,42
2.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan ekowisata	0,08	2,59	0,21
3.	Kurangnya edukasi tentang pengembangan ecowisata.	0,12	3,75	0,44
4.	Kebijakan pemerintah daerah kurang mendukung	0,13	4,00	0,51
Sub Total		0,44		1,57
TOTAL		1,0		2,17

Tabel 2 memperlihatkan faktor internal yang memengaruhi keberhasilan pengembangan ekowisata Mangrove Libsangaj. Faktor kekuatan (strengths) mencakup potensi alam yang khas, dukungan sosial masyarakat, dan keberadaan infrastruktur dasar wisata yang telah dibangun. Adapun faktor kelemahan (weaknesses) meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya promosi digital, dan lemahnya koordinasi kelembagaan (Gunawan et al., 2018). Temuan ini selaras dengan pendapat Noor (2014), bahwa analisis kekuatan dan kelemahan internal penting untuk menentukan arah strategi manajemen yang sesuai dengan kondisi lokal.

Tabel 3. Perhitungan Matriks EFAS

No.	Peluang	Bobot	Rating	Sko
1.	Meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata	0,13	4,80	0,6
2.	Peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan lingkungan dan budaya	0,13	4,73	0,6
3.	Peningkatan aksesibilitas ke destinasi ekowisata melalui pengembangan infrastruktur	0,12	4,87	0,5
4.	Adanya potensi pengembangan destinasi ekowisata yang baru dan unik	0,12	4,67	0,5
Sub Total		0,49		2,3
No.	Ancaman	Bobot	Rating	Sko
1.	Persaingan dengan destinasi okowisata lain yang lebih dikenal dan menawarkan harga yang lebih murah	0,12	4,21	0,5
2.	Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola ekowisata	0,13	4,55	0,6
3.	Permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekowisata mangrove	0,12	4,14	0,5
4.	Kebijakan pemerintah desa yang tidak konsisten dapat mempengaruhi pengembangan ekowisata	0,13	4,35	0,5
Sub Total		0,51		2,1
TOTAL		1,00		4,5

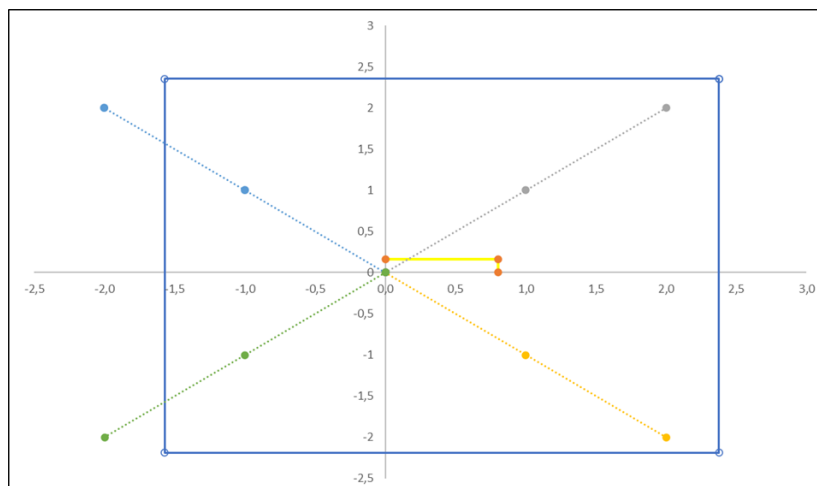
Tabel 3 menampilkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan ekowisata. Peluang utama meliputi dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan desa wisata, meningkatnya minat wisata alam, serta potensi kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi lingkungan (Puspita et al., 2022). Namun, ancaman muncul dari risiko perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan menurunnya jumlah wisatawan musiman

(Andiny, 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan harus adaptif terhadap dinamika eksternal, sebagaimana ditegaskan oleh Suting et al. (2020) bahwa pengelolaan berbasis komunitas harus memperhatikan perubahan lingkungan sosial dan ekologis agar tetap relevan.

Tabel 4. Hasil Perhitungan SWOT

Faktor Internal/Eksternal		Nilai Bobot	Nilai Skor
Kekuatan (<i>strengths</i>)			
	Sub-total	0,56	2,37
Kelemahan (<i>weakness</i>)			
	Sub-total	0,44	-1,57
Total skor		1	0,80
Peluang (<i>opportunities</i>)			
	Sub-total	0,49	2,35
Ancaman (<i>threats</i>)			
	Sub-total	0,51	-2,19
Total skor		1	0,16

Berdasarkan Tabel 4, hasil sintesis analisis SWOT menunjukkan bahwa nilai kekuatan dan peluang lebih dominan dibanding kelemahan dan ancaman. Hal ini menempatkan posisi pengelolaan wisata Mangrove Libsangaj pada kategori strategi agresif (*growth-oriented*). Artinya, kondisi saat ini sangat mendukung ekspansi program pengembangan wisata melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi promosi, serta diversifikasi produk wisata (Noor, 2014; Jaelani et al., 2024). Strategi ini sejalan dengan pandangan Huraerah (2017) dan Subrata (2024) bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan penguatan kelembagaan lokal serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata.



Gambar 3. Matriks Grand Strat

Gambar 3 menampilkan *Matriks Grand Strategy* yang menegaskan posisi ekowisata Mangrove Libsangaj di Kuadran I (strategi progresif). Hal ini berarti bahwa potensi sumber daya alam, dukungan sosial masyarakat, dan peluang kemitraan eksternal memberikan dasar kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat struktur kelembagaan desa, meningkatkan kerja sama lintas sektor, serta

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

mengembangkan wisata edukatif dan konservatif (Amalyah et al., 2016; Warningsih et al., 2020). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kawasan wisata Mangrove Libsangaj mampu menjadi contoh pengelolaan ekowisata berbasis lingkungan yang produktif sekaligus berkelanjutan di wilayah Maluku Utara.

KESIMPULAN

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Mangrove Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara diklasifikasikan menjadi 6 (enam) elemen yang tergabung antara lain Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Pariwisata, Pemerintah Desa Pohea dan Masyarakat Desa. Berdasarkan pemetaan Stakeholder 6 instansi tersebut tergabung dalam kuadran berdasarkan hasil pembobotan yaitu Kuadran I terdapat Bappeda dan Dinas Pariwisata, Kuadran II Pemerintah Desa Pohea dan Masyarakat, Kuadran III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula dan Kuadran IV Dinas Kehutanan. (Diversifikasi Strategi) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan berdasarkan hasil perhitungan SWOT. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan posisi mereka di pasar dan menghadapi persaingan yang ketat. Salah satu strategi yaitu dengan menyediakan sarana prasarana yang dapat menarik minat pengunjung juga memanfaatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan agar mendukung pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 37(1), 158–163. Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/118947>
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2), 102–109. <https://doi.org/10.20961/sepa.v7i2.48895>
- Andiny, P. (2020). Dampak pengembangan ekowisata hutan mangrove terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Langsa, Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1809>
- Ayesha, I., Rizal, A., & Gusvita, H. (2020). Analisis kelembagaan agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v2i1.10>
- Gunawan, A., Hidayat, A., & Anggraini, E. (2018). Analisis kelembagaan rehabilitasi mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 29–38. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i1.18130>
- Guntur, M. (2017). Kajian kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan, Provinsi Lampung, sebagai kawasan pariwisata. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Tropis*, 9(2), 135–145. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91036>
- Jaelani, J., Marsudi, H., Hidayat, A., & Triyanto, T. (2024). Kajian potensi ekowisata di kawasan Kampung Purba Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Janaka: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.36600/janaka.v5i1.372>
- Mandar, K. P., & Alfira, R. (2014). Identifikasi potensi dan strategi pengembangan ekowisata mangrove pada kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo.

- Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 5(2), 67–76.
<https://files.core.ac.uk/download/pdf/25497082.pdf>
- Noor, S. (2014). Penerapan analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran Daihatsu Luxio di Malang. *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik dan Niaga*, 14(2), 23–30.
<https://doi.org/10.31284/j.intekna.2014.v14i2>
- Puspita, Y., Diartho, H. C., Prananta, R., & Santoso, E. (2022). *Reservacation*: Aplikasi berbasis mobile untuk pengembangan ekowisata Kampung Blekok Desa Klatakan Kendit Kabupaten Situbondo menuju national destination tourism. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.37849/mipi.v5i2.303>
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(2), 67–75. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>
- Saputra, S., Sugianto, S., & Djufri, D. (2016). Sebaran mangrove sebelum dan sesudah tsunami di Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. *JESBIO: Jurnal Edukasi dan Sains Biologi*, 5(1), 12–19. <https://doi.org/10.24815/jesbio.v5i1.5931>
- Suting, H., Hamsiah, H., & Danial, D. (2020). Kajian pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Akuakultur, Teknologi, dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v3i2.76>
- Tamrin, M. H., & Rifti, L. (2023). Analisis stakeholder dalam pengelolaan BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 89–98. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.2303>
- Warningsih, T., Hidayah, W., & Hamidi, R. (2020). Kelembagaan lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. *Jurnal Sositelknologi*, 19(3), 275–284. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.3.5>